

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Secara umum dilihat dari presentase rasio kemandirian kinerja keuangan pemerintah Kota Gorontalo sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 masih belum mandiri, karena dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pemerintah Kota Gorontalo masih bergantung pada pendanaan pihak eksternal yakni bantuan pusat atau dana perimbangan. Untuk rasio efektifitas dan efisiensi pergerakan grafik rasio dari tahun ke tahun mengalami ketidaktetapan. Pada rasio efektifitas menggambarkan kinerja keuangan pemerintah Kota Gorontalo dari tahun 2009-2013 dalam hal efektifitas PAD menunjukkan garis grafik yang fluktuatif. Kinerja keuangan pemerintah Kota Gorontalo secara umum dinilai masih rendah artinya pengeluaran untuk belanja rutin/belanja operasi dinilai kurang mampu merealisasikan dana untuk belanja rutin dari tahun 2009-2013 dengan realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun 2009-2013. Untuk rasio DSCR kelayakan pemerintah Kota Gorontalo dalam melakukan pinjaman yaitu pada tahun 2012 dikarenakan PAD dan dana DAU yang mendukung serta dilihat dari kemampuan keuangannya mampu untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga. Pada rasio pertumbuhan dalam realisasi

penerimaan PAD menunjukkan tingkat kesehatan dengan rata-rata sangat baik tanpa menunjukkan presentase minus. Selama 5 tahun terakhir (2009-2013) pada rasio pengelolaan belanja, kinerja keuangan pemerintah Kota Gorontalo khususnya pada anggaran realisasi tetap mempertahankan surplus anggaran atau secara rinci bahwa pendapatan daerah mampu mencukupi kegiatan belanja pemerintah Kota Gorontalo.

## **5.2. Saran**

Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sesuai dengan kinerja keuangannya, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bermanfaat bagi pemerintah Kota Gorontalo, yakni sebagai berikut:

1. Untuk melepas ketergantungan terhadap dana eksternal pemerintah Kota Gorontalo mestinya menjadikan PAD sebagai tulang punggung sumber penyelenggaraan pemerintahan mengingat bahwa potensi komoditas seperti rotan polis, produk sulaman krawang. Potensi lainnya yakni banyaknya bangunan kost yang pajak retribusi belum maksimal pungutannya sama halnya dengan lahan parkir ditepi jalan umum dengan harga yang tinggi dari tahun ke tahun seperti yang tertera pada laporan keuangan Kota Gorontalo atas akun retribusi atas parkir ditepi jalan umum menunjukkan kurangnya perhatian Pemda dalam melakukan pungutan..

2. Pemerintah Kota Gorontalo hendaknya bisa menekan biaya belanja rutin khususnya belanja perjalanan dinas, mengingat PADnya kecil.
3. Dalam melakukan pinjaman atau hutang kepada pihak eksternal hendaknya pemerintah menganalisis secara matang apakah pinjaman tersebut perlu untuk dilakukan dan manfaatnya seberapa besar dan resiko yang akan dihadapi ke depan. Sehingga hutang ke pihak eksternal tersebut akan membebani pihak pemerintah daerah khususnya keuangan daerah itu sendiri.
4. Pemerintah Kota Gorontalo hendaknya bisa mengoptimalkan PAD sehingga kemandirian fiskalnya besar dan Kota Gorontalo tidak perlu melakukan pinjaman.
5. Pemerintah Kota Gorontalo hendaknya memaksimalkan kinerja keuangan dalam hal realisasi anggaran khususnya pada Pendapatan Asli Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Mhd. Karya Satya, 2008. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah, *Tesis*, Departemen Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Bastian, Indra. 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah, BPFE*. Yogyakarta.
- Badan Akuntansi Keuangan Negara, 2001. Departemen Keuangan RI.
- Bappeda Kota Gorontalo, Data Konsep RPJMD Tahun 2008-20013.
- Daliluwa, F Indriani, 2012. Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Gorontalo. *Skripsi*. Universitas Negeri Gorontalo
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan-kementrian Keuangan, Data Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2009 -2013.
- Helfert, Erich. 2000. *Teknik Analisa Keuangan*. Erlangga. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP. STIM. YKPN. Yogyakarta.
- . 2002. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- . 2004. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. UPP. AMP. YKPN. Yogyakarta.
- . 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP. STIM. YKPN. Yogyakarta.
- . 2012, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP. STIM. YKPN. Yogyakarta.

- Janur, Yurdila, Martha. 2009. Analisis terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bungo Sesudah Otonomi Daerah tahun 2003- 2007. *Skripsi*. Sumatera Utara Medan.
- Kajian Ekonomi Keuangan. Analisis Ekonomi dan Fiskal Gorontalo Triwulan II-2013, ([http:// fiskal.depkeu.go.id](http://fiskal.depkeu.go.id). Diakses 15 maret 2014).
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan-Kementrian Keungan*, Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I 2013.
- Pemerintah Kota Gorontalo. Laporan Akuntabilitas Kinerja Keuangan (LAKIP).2012.(<http://gorontalokota.go.id/>. Diakses 25 April 2014).
- Lembaga Pengkajian Pembangunan Gorontalo (LP2G).2013, (Diakses 5 juli 2014.<http://b3wpgorontalo.wordpress.com/2013/01/21>).
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. UPP. STIM. YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Good Governance, Democratization, Local Government Financial Management*, Edisi Bahasa Indonesia. Andi. Yogyakarta.
- Martono, Agus, Warijo. 2001. *Menajemen Keuangan Edisi Keempat*. BPFE. Yogyakarta.
- Mirza, Rifka, Amalia, 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005- 2010. *Skripsi*. Semarang.
- Munawir, Slamet. 1995. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty. Yogyakarta.
- Permendagri nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1.
- Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006, Tentang Pelaporan Keungan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Profil Kabupaten / Kota, Kota Gorontalo. (Diakses 25 Maret 2014. [Http:// ciptakarya.pu.go.id](Http://ciptakarya.pu.go.id)).

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 4 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_. Lampiran Permendagri Nomor 27 Tahun 2013, Tentang Pedoman Penyusunan APBD.

\_\_\_\_\_. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Raharjo, Budi. 2001. *Akuntansi dan Keuangan untuk Manager Non Keuangan*. Andi. Yogyakarta.

Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba . Edisi Pertama*. Mitra Wicana Media. Jakarta.

Susantih, Seftiana, Yulia. 2010. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan. *Skripsi*. Sumatra Selatan.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah didaerah

Wahyuni, Nanik. 2012. Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Keupangan Daerah. Kota Malang.

Winartha, I Made. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi, Tesis*. Andi . Yogyakarta.

Widada, Sri. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Klaten.

